

Judul : Rekam jejak calon Ketua DPR perlu dibuka
Tanggal : Jumat, 08 Desember 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

Rekam Jejak Calon Ketua DPR Perlu Dibuka

JAKARTA—Kader Partai Golkar yang akan menduduki jabatan ketua DPR menggantikan Setya Novanto diharapkan memiliki rekam jejak yang baik. Bahkan rekam jejak para calon perlu dibuka ke publik sebelum yang bersangkutan ditunjuk memimpin parlemen.

Rekam jejak para calon ketua DPR perlu dibuka demi menghindari potensi munculnya kasus di belakang hari. Kasus Setya Novanto yang kini menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) sedikit banyak telah memberi kontribusi pada kian menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Hasil survei Poltracking Indonesia yang dilakukan pada 8–11 November 2017 menunjukkan DPR merupakan lembaga yang kepercayaan terhadapnya paling rendah, yakni di angka 50%. Hasil survei ini menunjukkan TNI sebagai lembaga negara yang paling dipercaya publik dengan 76%, disusul Kepresidenan 75% dan KPK 68%. DPR bahkan lebih rendah dari DPD yang mendapatkan angka 52%.

"Salah satu yang membuat DPR tidak dipercaya publik adalah kesan selama ini bahwa lembaga ini anti terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)."

JEIRRY SUMAMPOW
Koordinator Komite Pemilih Indonesia

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan, Golkar harus bisa mencalonkan figur yang benar-benar mampu menjawab kebutuhan parlemen saat ini. Tantangan terbesar yang dihadapi ketua DPR baru adalah mengembalikan citra DPR yang di zaman Novanto disebutnya terpuruk cukup dalam.

Menurut dia, selain kriteria klasik seperti kapasitas dan integritas, ada empat kriteria yang harus dimiliki ketua DPR baru nanti. Pertama, figur tersebut harus pro-pemberantasan korupsi dan siap menunjukkan komitmennya untuk

memerangi korupsi.

"Salah satu yang membuat DPR tidak dipercaya publik adalah kesan selama ini bahwa lembaga ini anti terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," ujarnya kemarin.

Kriteria kedua, figur tersebut tidak punya kasus di masa lalu. Kejadian saat Setya Novanto ditawari menjadi ketua DPR pertama kalinya diharapkan tidak terulang. "Saat itu Setya Novanto sebenarnya sudah diragukan publik karena dia disebut-sebut terkait dengan kasus korupsi," ujarnya.

Ketiga, figur tersebut harus bisa diterima publik dan punya kemampuan komunikasi yang baik. Ketua DPR menurut dia merupakan representasi wajah parlemen sehingga harus bisa menunjukkan wajah yang diterima publik. Dia harus punya kemampuan berkomunikasi dengan publik, dan punya empati terhadap persoalan publik. Saya kira jika itu dilakukan bisa membuat DPR terhormat kembali," lanjutnya.

Keempat, figur tersebut harus punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Tak dapat dimungkiri polarisasi politik di DPR sangat kencang sehingga butuh kepemimpinan yang bisa menyatukan kepentingan. Ketua DPR yang baru tidak boleh menampilkan wajah seolah mementingkan kepentingan golongan sendiri.

Jeirry menilai, penentuan ketua DPR baru nanti menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Golkar. Jika berhasil menampilkan calon yang dinilai memenuhi kriteria, secara tidak langsung hal itu akan memberi dampak elektoral positif bagi Golkar menjelang pemilu.

"Kalau ketua DPR bisa membuat lembaga menjadi berbeda dan publik terkesan, konsekuensinya akan positif kepada Golkar, akan memberi keuntungan elektoral," tandasnya.

Hal serupa diungkapkan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Menurut dia, rekam jejak calon ketua DPR bahkan harus dibuka ke publik.

"Itu penting agar dia tidak menyimpan bara kasus yang bisa mengganggu pekerjaan, termasuk membuat citra DPR menurun. Rekam jejaknya harus dibuka agar tak mengecewakan publik di kemudian hari,"

ujarnya di Jakarta kemarin.

Saat ini muncul empat nama yang digadang-gadang bakal diutus Partai Golkar untuk memimpin parlemen. Mereka adalah Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsuddin, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, Sekretaris Fraksi Golkar DPR Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain itu nama Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firmansyah juga mulai dimunculkan.

Dari nama itu, Karus menilai Gumiwang layak dipertimbangkan untuk menggantikan Novanto. "Selain muda, dia juga sejak awal tampak tak sekelompok dengan Novanto," katanya.

Di sisi lain, Karus menilai Gumiwang tidak memiliki catatan buruk kasus hukum bila dibandingkan dengan calon lain.

Dukungan juga mulai diperoleh Bambang Soesatyo. Ketua Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar ini antara lain didukung oleh partai lain di DPR.



ZAINUDDIN AMALI

Lahir : Gorontalo, 16 September 1962
Jabatan di DPR : Ketua Komisi II (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri)
Dapil : Jawa Timur XI
Anggota DPR Sejak : Pemilu 2004

Jabatan di Partai : Ketua Bidang Pembangunan Daerah dan Desa DPP Golkar

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menilai pengganti Novanto perlu mempunyai visi, misi dan sikap yang baik untuk mengangkat marwah DPR. Selain itu, harus lebih mengedepankan sikap kenegarawanan ketimbang sikap sebagai politisi. Kriteria tersebut menurut dia ada pada Bambang.

"Dia harus pribadi yang bijak bagi semua anggota DPR dan merupakan personifikasi dari fraksi-fraksi. Jadi tidak hanya merepresentasikan kepentingan fraksinya saja," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/12).

Zainudin Amali mengatakan, kemungkinan besar per-

DPR, Amali enggan berandai-andai. Karena menurutnya jabatan yang diembandi Komisi II DPR tak kalah penting dari jabatan ketua DPR.

Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin yang namanya ikut disebut-sebut calon ketua DPR mengatakan masih menunggu penugasan partai,

belum bisa dibicarakan karena belum ada kepastian waktu pelaksanaan munaslub. "(Soal pencalonan) belum, masih menunggu putusan praperadilan. Surat-surat yang masuk ke DPD kemarin kan masih akan kita verifikasi. Kalau mekanisme dan sistem telah ada tentu berdasarkan hasil pleno tanggal 21

gantung pada kepentingan dan dinamika di munaslub mendatang.

"Tidak bisa diprediksi siapa yang menjadi ketua DPR karena nanti pasti ketua umum terpilih berharap ketua DPR itu adalah yang bisa bekerja sama dengan baik dengan pimpinan Golkar," kata Mahyudin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/12).

Karena itu, menurutnya, sudah barang tentu posisi Ketua DPR ini akan ditentukan pasca pemilihan ketua umum baru. Meskipun ada desakan dari fraksi-fraksi di DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), hal itu tidak memengaruhi karena posisi ketua DPR merupakan hak Golkar.

"Boleh-boleh saja mereka mendesak. Memang haknya Golkar. Dan, pimpinan DPR itu kan kolektif. Kalau ketua berhalangan masih ada empat lainnya," tandasnya.

Pelaksana tugas Ketua Umum Golkar Idrus Marham mengatakan, semua anggota fraksi Golkar di DPR yang ber-

BERSAING PIMPIN PARLEMEN

Rencana Partai Golkar memilih ketua umum baru melalui musyawarah nasional luar biasa ikut menghantarkan persaingan internal fraksi di DPR. Empat anggota Fraksi Partai Golkar dinilai bersaing menjabat ketua DPR untuk mengganti Setya Novanto.



AGUM GUMILANG KARTASASMITHA

Lahir : Jakarta, 3 Januari 1969

Jabatan di DPR : Sekretaris Fraksi Partai Golkar

Dapil : Jawa Barat II

Anggota DPR Sejak: Pemilu 2009

Jabatan di Partai: Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat DPP Golkar

AZIS SYAMSUDIN

Lahir : Jakarta, 31 Juli 1970

Jabatan di DPR : Ketua Badan Anggaran Anggota DPR Sejak: Pemilu 2009

Dapil : Lampung II

Jabatan di Partai: Ketua Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah DPP Golkar

BAMBANG SOESATYO

Lahir : Jakarta, 10 September 1962

Jabatan di DPR : Ketua Komisi III (Bidang Hukum dan HAM)

Dapil : Jawa Tengah VII

Anggota DPR Sejak: Pemilu 2009

Jabatan di Partai: Ketua Pemenangan Pemilu DPP Golkar

gantian ketua DPR menunggu hasil munaslub untuk menetapkan ketua umum DPP Golkar yang baru. Untuk itu Plt Ketua Umum juga sudah menetapkan pekan depan akan digelar rapat pleno untuk mengagendakan munaslub.

Adapun mengenai isu pencalonan dirinya sebagai ketua

baik untuk maju menjadi calon ketua umum Partai Golkar maupun calon ketua DPR.

"Saya tergantung perintah partai. Perintah partai suruh saya jadi anggota ya jadi anggota, mekanismenya tentu tergantung dari DPP Partai Golkar," ujar Aziz kemarin.

Dia mengaku soal ketua DPR

November itu kan kita akan pleno setelah putusan praperadilan," ujar Aziz.

Wakil Ketua Dewan Farkar DPP Partai Golkar Mahyudin mengakui menguatnya sejumlah nama anggota fraksi ini. Dia tidak bisa menilai siapa yang paling berpeluang karena posisi ketua DPR juga ber-

jumlah 91 punya peluang untuk menduduki kursi ketua DPR. Namun, Golkar saat ini masih fokus pada agenda pelaksanaan munaslub dan posisi ketua DPR akan diputuskan nanti.

"Punya peluang semua, tentu nanti akan kita bicarakan," kata Idrus.

© kiswondari/ant